



**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH (RLPPD) TAHUN 2023**

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan bersifat konkuren yang bermakna bahwa urusan pemerintahan tersebut dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan yang bersifat konkuren mencakup 6 (enam) urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar dan 8 urusan pemerintahan pilihan, serta urusan fungsi penunjang pemerintahan.

Keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023 dapat digambarkan dalam capaian kinerja, yaitu pertama dalam capaian kinerja makro yang terdiri dari 6 (enam) Indikator Kinerja Kunci (IKK) antara lain, indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, dan ketimpangan pendapatan. Kedua dalam capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari yaitu 6 (enam) urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar dan 8 (delapan) urusan pemerintahan pilihan, serta urusan fungsi penunjang pemerintahan, mengukur Indikator kinerja Kunci Hasil (Outcome). Ketiga dalam capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah yang menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur. Sumber informasi utama untuk data pendukung yang dituangkan dalam LPPD berasal dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan secara lengkap dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro yang merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 secara umum. Ada 6 (enam) aspek capaian kinerja makro yang dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya yang juga terkait dalam pembangunan nasional, antara lain yaitu indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan ketimpangan pendapatan, lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 2. 1
Capaian Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,65 poin	72,37 poin	1,005
2	Angka Kemiskinan	13,68 %	13,85 %	1,243
3	Angka Pengangguran	2,89 %	2,8 %	(-3,114)
4	Pertumbuhan Ekonomi	6,95 %	1,8 %	(-74,101)
5	Pendapatan Per kapita	Rp 28.672.388	Rp 29.925.527	4,377
6	Ketimpangan Pendapatan	0,373 poin	0,375 poin	0,536

Sumber : Badan Pusat Statistik NTB, 2023

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami peningkatan dari 71,65 poin pada tahun 2022 menjadi 72,37 poin pada tahun 2023. Pertumbuhan IPM NTB di tahun 2023 mencapai 1,005 persen dan sudah berada pada kategori tinggi dan tumbuh di atas rata-rata Nasional.

b. Angka Kemiskinan

Pada tahun 2023 berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, angka kemiskinan tercatat mengalami peningkatan laju kinerja sebesar 1,243 persen dengan jumlah penduduk miskin di Provinsi NTB pada Maret 2023 mencapai 751,23 ribu orang. Jika dibandingkan dengan Maret 2022, jumlah penduduk miskin bertambah sebanyak 19,29 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sebesar 13,85 persen, meningkat 0,03 persen poin terhadap September 2022 dan naik 0,17 persen poin terhadap Maret 2022.

c. Angka Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi NTB berada pada nomor 4 terendah di Indonesia. Jika dibanding dengan tahun 2022 dengan angka sebesar 2,89 persen menurun menjadi 2,80 persen dari jumlah angkatan kerja di Agustus Tahun 2023 sebanyak 2,89 juta. Tingkat tersebut turun sebanyak 0,09 persen.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Saat ini Provinsi NTB masih ditahap pemulihan yang ditandai dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2023 sebesar 1,80 persen. Peningkatan positif terjadi pada sisi produksi, lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,31 persen. perekonomian NTB berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan IV-2023 mencapai Rp 43,60 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 26,86 triliun.

e. Pendapatan Per kapita



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PSesuai dengan data dari provinsi dalam angka yang dirilis BPS, bahwa Produk Domestik Regional Bruto atas harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2023 provinsi NTB sebesar 166.394,91 miliar dibagi dengan jumlah penduduk tahun 2023 sebanyak 5.560.730 jiwa, dan menghasilkan pendapatan perkapita sebesar 29.925.527 rupiah, meningkat sebesar 4,377 persen.

f. Ketimpangan Pendapatan

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio, nilai Gini Ratio berkisar antara 0 - 1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio provinsi Nusa Tenggara Barat pada Maret 2023 adalah sebesar 0,375, lebih tinggi dari Maret 2022 dan September 2022 mencapai 0,002 poin atau meningkat sebesar 0,536 persen.

2. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

Urusan wajib terkait pelayanan dasar mencakup urusan pemerintahan sebagai berikut :

- 1) Urusan Pendidikan
- 2) Urusan Kesehatan
- 3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 4) Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 5) Urusan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat
- 6) Urusan Sosial

1) Pendidikan

Tabel 2. 2
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan

No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja (%)	Sumber Data	
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	Jumlah anak usia 16 -18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah atas	204.496	98,85	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
		Jumlah anak usia 16-18 tahun pada provinsi yang bersangkutan	206.865		
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Jumlah anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan khusus	3.842	87,74	
		Jumlah anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas pada provinsi yang bersangkutan	4.379		

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat melaporkan bahwa pada tahun 2023 capaian kinerja Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah baik itu pada SMA, SMK, MA tidak termasuk Program



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Penyetaraan, mencapai 98,85 persen dengan perubahan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 98,50 persen, dari 206.865 orang anak usia 16-18 tahun pada provinsi NTB ada sebanyak 204.496 anak usia 16 -18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah atas baik di sekolah negeri maupun swasta. Berdasarkan angka tersebut dari 216.848 anak usia 16-18 tahun Provinsi NTB, masih ada 2.369 anak yang belum berpartisipasi pada Pendidikan Menengah, ini disebabkan karena beberapa hal antara lain, pernikahan usia dini yang menyebabkan anak tersebut berhenti sekolah, faktor ekonomi, lebih memilih bekerja daripada sekolah dan lain sebagainya.

Keberhasilan lain pada urusan pendidikan Tahun 2023 juga ditunjukkan pada Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus ada peningkatan 1,12 persen dengan capaian kinerja tahun 2022 86,62 persen meningkat di tahun 2023 menjadi 87,74 % yaitu dari 4.379 anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas provinsi NTB, ada sekitar 3.842 anak yang berpartisipasi pada Pendidikan Khusus, angka tersebut menunjukkan bahwa meskipun dengan keterbelakangan mental maupun fisik, keinginan belajar dan sekolah dari siswa disabilitas tetap menunjukkan kemajuan dan peningkatan yang positif, ini tidak terlepas dari campur tangan semua pihak baik itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB yang terus menyediakan fasilitas sarana prasarana sekolah khusus disabilitas, kecakapan tenaga pendidik dalam mengajar maupun kemauan para orang tua yang tetap memberikan pendidikan formal kepada anak anaknya.

2) Kesehatan

Tabel 2. 3
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja (%)	Sumber Data	
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di provinsi	5.806	1,04	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
		Jumlah penduduk provinsi	5.576.992		
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah Rumah Sakit Rujukan provinsi yang Terakreditasi	2	100	
		Jumlah Seluruh Rumah Sakit Provinsi	2		
3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Jumlah Penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan /auatu berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun	18.617	100	
		Jumlah Penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana dalam kurun waktu satu tahun	18.617		
4	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB	Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	1.514	100	



No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja (%)	Sumber Data
	provinsi	Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB	1.514	

Ada beberapa indikator keberhasilan penyelenggaraan urusan kesehatan tergambar dalam capaian indikator kinerja kunci outcome Dinas Kesehatan Provinsi NTB sebagaimana yang sudah dilaporkan bahwa pelaksanaan terlaksana dengan baik sebagai dijelaskan lebih lanjut dalam pembahasan ini.

Rumah Sakit Rujukan Provinsi yang terakreditasi adalah 2 rumah sakit yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Manambai Sumbawa dengan akreditasi utama dan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB dengan akreditasi paripurna.

Selama Tahun 2023 ada banyak terjadi krisis kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana yang terjadi seperti Keracunan Pangan, Demam Berdarah, Malaria, Diare, Limpuh Layuh (AFP), Suspek Pertusis, Rabies, kesehatan jiwa, dan penyakit lainnya yang menyerang masyarakat. Dinas Kesehatan melaporkan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana tersebut dapat tertangani 100 % dengan baik yaitu sebanyak 18.617 orang penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana seluruhnya mendapatkan pelayanan kesehatan.

Selain pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana, pelayanan kesehatan juga diberikan kepada 1.514 orang penduduk yang terdampak dan berisiko pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi NTB hal ini menunjukkan pencapaian 100% karena seluruh masyarakat yang terdampak menerima pelayanan tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa 117 kejadian luar biasa yang terjadi dapat tertangani seluruhnya.

3) Pekerjaan Umum

Tabel 2. 4
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum

No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja (%)	Sumber Data	
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Provinsi (ha)	0	0	Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Provinsi (ha)	1		



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja (%)	Sumber Data
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi (ha)	0	0
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan provinsi (ha)	1	
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan yang dibangun (ha) ditingkatkan (ha) dioperasikan dan pelihara (ha) ditahun eksisting	43.431,85	74,74
		luas daerah irigrasi kewenangan provinsi	58.105	
4	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	jumlah kumulatif kapasitas terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota	0	0
		Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota di provinsi	1	
5	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	Total Limbah yang masuk dalam SPAL domestik Regional	0	0
		Total kapasitas pengolahan limbah domestik SPAL domestik Regional	1	
6	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap	1.254,57	84,52
		Panjang jalan keseluruhan di wilayah Provinsi	1.484,43,	
7	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Jumlah tenaga konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	2.981	49,25
		Jumlah kebutuhan tenaga ahli di wilayah provinsi	5.870	

Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas PU dan Tata Ruang Provinsi NTB. Indikator Kinerja Kuncinya adalah Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir dan Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Provinsi. Kedua Urusan tersebut merupakan Wilayah Sungai Strategis Nasional yang pengelolaannya oleh Pemerintah Pusat sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2015.

Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi dengan perhitungan luas irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (Ha), yang ditingkatkan (Ha), yang direhabilitasi (Ha), dioperasikan (Ha) dan



dipelihara (Ha) di tahun eksisting sekitar 43.431,85 Ha dari luas daerah irigasi kewenangan provinsi yaitu 58.105 Ha.

Data terkait presentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kabupaten/Kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas Kabupaten/Kota sampai saat ini Pemerintah Provinsi sesuai kewenangan belum membangun Instalasi Pengolahan Air (IPA) curah beserta jaringannya, sehingga data terkait volume air curah dan persentase kapasitas yang dapat terlayani belum ada karena belum adanya data potensi air baku dan data kebutuhan air curah regional (kebutuhan air curah dari Kabupaten/ Kota) serta karena keterbatasan anggaran pada tahun 2023.

Data terkait Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL regional belum dilaksanakan oleh Dinas PUPR Provinsi NTB karena belum adanya data potensi/kelayakan dibangunnya SPALD Regional dan karena keterbatasan anggaran pada tahun 2023.

Rasio kemandirian jalan yang ada di Provinsi NTB sekitar 84,51 persen, dari keseluruhan panjang jalan di wilayah provinsi sesuai SK Kepala Daerah jalan kewenangan provinsi yaitu 1.484,43 Km dan panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap sekitar 1.254,57 Km.

Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli berada pada angka 49,25 persen yaitu dari total Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli sebanyak 2.891 orang dengan jumlah kebutuhan tenaga ahli di wilayah provinsi sebanyak 5.870 orang.

4) Perumahan Rakyat dan Permukiman

**Tabel 2. 5
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman**

No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja (%)	Sumber Data
1.	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2023	0	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB
		jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2023	1	
2.	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan+rumah tangga penerima subsidi uang sewa+rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni	0	0



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus		Capaian Kinerja (%)	Sumber Data
		Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	1		
3.	Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10-15 ha yang ditangani (ha)	207,88	33,92	
		Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10-15 ha	612,83		
4.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	95	63,33	
		Jumlah unit perumahan	150		

Pada tahun 2023, Dinas Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB melaporkan karena tidak terjadi bencana yang membutuhkan pengadaan rumah layak huni bagi korban bencana, maka indikator ini tidak dapat dilaksanakan. Namun Pemerintah Provinsi NTB sudah menganggarkan kegiatan ini sebagai bentuk pencegahan atau antisipasi apabila terjadi bencana.

Berdasarkan surat pernyataan dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi NTB bahwa Presentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni yang dilihat dari data rumah tangga penerima fasilitasi penggantian ha katas tanah dana tau bangunan, data rumah tangga penerima subsidi uang sewa dan data rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni, kegiatan tersebut tidak dianggarkan karena beberapa hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Permen PUPR No. 29/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
2. Sampai saat ini belum ada kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan Pengembangan perumahan baru Skala besar melalui penyediaan akses yang mengharuskan pengurangan kawasan kumuh 10-15 ha, dibutuhkan kajian dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Pada tahun 2023, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB telah menangani 207,88 Ha kawasan kumuh 10 – 15 Ha dari total 612,83 luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang berada pada Provinsi NTB. Penanganan tersebut mencapai sekitar 33,92 persen



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

yang meningkat dibanding tahun 2022 sebanyak 15 persen atau sekitar 94,96 Ha luas kawasan yang dapat ditangani.

Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU mencapai 63,33 persen yaitu dari total 150 jumlah unit perumahan terdapat 95 unit Perumahan yang telah mendapatkan bantuan fasilitas PSU di Provinsi NTB tahun 2023, yang dimana angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 52,13 persen.

5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2. 6
Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus		Capaian Kinerja (%)	Sumber Data
1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani/diselesaikan	7	100	SATPOLPP Provinsi NTB
		Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	7		
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	37	100	
		Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	37		
3.	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen kebencanaan yang disusun	2	66,66	
		Jumlah dokumen kebencanaan yang akan disusun	3		
4.	Persentase penanganan pra bencana	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pra bencana	10	100	BPBD Provinsi NTB
		Jumlah Kabupaten/kota	10		
5.	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Jumlah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana	10	100	
		Jumlah Kabupaten/kota di wilayah provinsi yang mengalami bencana	10		

Satpol PP Provinsi NTB melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Pada tahun 2023, terdapat 7 jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk di Satpol PP Provinsi NTB. Persentase Gangguan Trantib yang dapat diselesaikan oleh Satuan Pol PP Provinsi NTB mencapai 100 persen dari seluruh pengaduan yang masuk melalui pengaduan langsung dan melalui surat. Penyelesaian yang dilakukan Pol PP Provinsi NTB dengan turun langsung ke lokasi kejadian.

Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan oleh Satuan Pol PP Provinsi NTB mencapai 100 persen. Satpol PP Provinsi NTB mampu menegakkan seluruh Perda/Perkada yang ada yaitu 37



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Perda/Perkada termasuk dalam tindakan preventif yang telah dilakukan oleh Satpol PP Provinsi NTB.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB juga melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat terkait bencana. Pada tahun 2023, dokumen kebencanaan yang disusun sampai dengan dinyatakan sah/legal masih sama seperti tahun 2022 yaitu terdapat 2 dokumen kebencanaan dari 3 dokumen yang akan disusun.

Penangan Pra Bencana di Provinsi NTB sudah mencapai 100 persen yang dilihat dari jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pra bencana dari jumlah keseluruhan kabupaten/kota yang ada di Wilayah Provinsi NTB yaitu 10 Kabupaten/Kota seluruhnya sudah terfasilitasi. Data Penanganan Tanggap Darurat Bencana Provinsi mencapai angka 100% karena dari seluruh Kabupaten/Kota yang di Wilayah Provinsi NTB semuanya terfasilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana.

6) Sosial

Tabel 2. 7
Capaian Kinerja Urusan Sosial

No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja (%)	Sumber Data	
1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah penyandang disabilitas yang terpenuhi didalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100	Dinas Sosial Provinsi NTB Dinas Sosial Provinsi NTB
		Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	100		
2.	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	226	100	
		Populasi anak terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	226		
3.	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Lanjut Usia terlantar didalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	130	100	
		Populasi Lanjut Usia terlantar di provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar didalam panti	130		
4.	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	57	100	



No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Rumus	Capaian Kinerja (%)	Sumber Data
		Populasi gelandangan dan Pengemis Terlantar didaerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar didalam panti	57	
5.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	16.722	100
		Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah provinsi yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi	16.722	

Urusan Wajib Pelayanan Dasar bidang Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat adapun capaian kinerja penyelenggaraan yang telah dilaksanakan terlihat pada Capaian Kinerja Panti Sosial Bina Laras (PSBL) Mutmainah memberikan pelayanan dan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas dengan jumlah penanganan bagi penerima manfaat sebanyak 100 orang. Pada Tahun 2023 capaian kinerja rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar dalam panti adalah 100 Orang (100 persen) karena seluruh penyandang disabilitas terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial di dalam panti dapat terlayani.

Hal yang sama juga pada jumlah anak terlantar yang direhabilitasi di dalam panti mencapai 100 persen dengan jumlah anak terlantar yaitu 226 orang yang direhabilitasi di dalam panti seluruhnya dapat terlayani dengan baik.

Pada tahun 2023 Rehabilitasi bagi lanjut usia dilaksanakan pada Panti Sosial Lanjut Usia (PSLU) Mandalika yang memberikan perlindungan, pelayanan dan bimbingan bagi lanjut usia terlantar dengan jumlah penanganan bagi penerima manfaat sebanyak 80 orang dan seluruh lanjut usia terlayani dengan baik. Kemudian pada Panti Sosial Lanjut Usia (PSTW) Meci Angi memberikan perlindungan, pelayanan dan bimbingan bagi lanjut usia dengan dengan jumlah penanganan bagi penerima manfaat sebanyak 50 orang per tahun, dari rincian tersebut total Usia lanjut terlantar yang tertangani adalah 130 orang.

Tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis juga tidak lepas dari perhatian Pemerintah Provinsi NTB, selama tahun 2023 terdapat pengurangan jumlah Tuna Sosial yang terdiri dari gelandangan dan pengemis yaitu sebesar 57 orang dibanding tahun 2022 yang mencapai 75 orang. Sebanyak 57 orang Tuna social tersebut direhabilitasi didalam Panti Sosial Bina Karya (PSBK) Madani



Lombok Timur sebagai tempat rehabilitasi khusus gelandangan dan pengemis memberikan pelayanan kebutuhan dasar.

Selama tahun 2023 terjadi beberapa bencana alam dan bencana sosial. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin topan, kekeringan, dan gempa bumi sedangkan bencana sosial yang melanda masyarakat ialah konflik sosial dan kebakaran. Dalam Laporanannya Dinas Sosial Provinsi NTB telah menyediakan kebutuhan Masyarakat untuk menghadapi situasi tersebut. Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sebanyak 16.722 orang dan terlayani 100 persen.

3. Hasil EPPD dan Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022

- 1) Hasil EPPD Tahun Sebelumnya Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022, Provinsi NTB berhasil mendapatkan hasil EPPD dengan skor kinerja 3.0439 dan status kinerja sedang.
- 2) Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya Berdasarkan Laporan Nomor 151.C.LHP/XIX.MTR/05/2022 Provinsi NTB berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2021, yang berarti telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu yang sesuai dengan prinsip akuntansi.

4. Ringkasan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah

a. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun. APBD Provinsi NTB ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan perubahannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

APBD terdiri dari tiga komponen utama yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah terdiri



dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), pos Pendapatan Transfer, dan pos Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD terdiri dari komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan sumber pendapatan utama dari pemerintah daerah itu sendiri yang diperoleh dari wajib pajak dan wajib retribusi. Selain dari sumber utama tersebut, PAD juga bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah. Selanjutnya untuk Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah (DID) sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa bantuan keuangan dari Kab/Kota. Selain sumber pendapatan yang diperoleh dari PAD dan Pendapatan Transfer, pemerintah daerah juga memperoleh pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (LLPD).

Sesuai struktur APBD Komponen belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran Pemerintah Provinsi NTB untuk mendanai kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri atas beberapa komponen belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD Provinsi NTB untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Serta Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Provinsi NTB kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau kepada Pemerintah Desa. Belanja Transfer dirinci berdasarkan Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Dalam pengelolaan keuangan, pembiayaan daerah merupakan semua transaksi keuangan yang dilakukan baik untuk menutup defisit maupun untuk memanfaatkan adanya surplus. Defisit merupakan kondisi dimana anggaran pendapatan lebih kecil dari anggaran belanja dan sebaliknya surplus merupakan kondisi dimana anggaran pendapatan lebih besar dari anggaran belanja. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperkirakan dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan surplus tersebut antara lain dengan melakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk giro/deposito, pembentukan dana cadangan maupun penyertaan modal,



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

namun bila diperkirakan dalam keadaan defisit maka kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu untuk menutupi defisit tersebut. Realisasi keuangan daerah yang disajikan berikut merupakan data yang belum diaudit (unaudited) oleh BPK-RI mengingat hasil audit BPK baru akan diterima maksimal 31 Mei 2024 atau 2 (dua) bulan setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diserahkan ke BPK

Pada tahun 2023, nilai realisasi pendapatan daerah Provinsi NTB sebesar Rp. 5.797.973.593.471,84. Sedangkan nilai realisasi belanja daerah Provinsi Tahun 2023 sebesar Rp. 5.686.300.429.147,25.

1) Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Komponen pendapatan daerah Provinsi NTB tahun 2023 terdiri dari Pendapatan PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian target, realisasi dan kontribusi masing-masing komponen pendapatan daerah tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.22
Target, Realisasi dan Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah
Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Target	Realisasi		Kontribusi Terhadap Total Realisasi Pendapatan Daerah
			Rp.	%	
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.069.211.488.392,00	2.790.031.650.553,84	90,90	48,12
2	PENDAPATAN TRANSFER	3.142.935.103.846,00	3.007.931.709.650,00	95,70	51,88
3	LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.233.268,00	10.233.268,00	100	0,00
	Total	6.212.156.825.506,00	5.797.973.593.471,84	93,33	100,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB, 2023

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2023, realisasi pendapatan daerah Provinsi NTB adalah sebesar Rp. 5.797.973.593.471,84 dari target anggaran pendapatan sebesar Rp. 6.212.156.825.506,00 atau sekitar 93,33 %. Perbandingan realisasi pendapatan daerah tahun 2022 dan 2023 digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 1.13
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022 dan 2023

No.	Uraian	Realisasi		Peningkatan / (Penurunan)	
		Tahun 2022	Tahun 2023	Nilai	%
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.292.065.852.874,77	2.790.031.650.553,84	497.965.797.679,07	21,73
2	PENDAPATAN TRANSFER	2.978.480.323.175,00	3.007.931.709.650,00	29.451.386.475,00	0,99
3	LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	32.067.595.936,00	10.233.268,00	-32.057.362.668,00	-99,97
	Total	5.302.613.771.985,77	5.797.973.593.471,84	495.359.821.486,07	9,34

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB, 2023



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Total realisasi pendapatan daerah Provinsi NTB tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp. 495.359.821.486,07 atau 9,34 % dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 5.302.613.771.985,77. Penyumbang peningkatan pendapatan daerah terbesar terdapat pada komponen Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 497.965.797.679,07, sedangkan Pendapatan Transfer meningkat sebesar Rp. 29.451.386.475,00 dan penurunan pendapatan terjadi pada Lain-lain Pendaatan Yang Sah menurun sebesar Rp. 32.057.362.668,00.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dipungut oleh daerah berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. PAD terdiri dari: 1) Pendapatan Pajak Daerah; 2) Hasil Retribusi Daerah; 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Realisasi PAD tahun 2023 sebesar Rp. 2.790.031.650.553,84 atau 90,90 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 3.069.211.488.392,00 diperoleh dari 21 Organisasi Perangkat Daerah Penghasil dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.14
Organisasi Perangkat Daerah Penghasil PAD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023

No.	Organisasi Perangkat Daerah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi
3	Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat
3	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi
4	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi
5	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9	Dinas Perhubungan
10	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
11	Dinas Pemuda dan Olahraga
12	Dinas Kelautan dan Perikanan
13	Dinas Pariwisata
14	Dinas Pertanian dan Perkebunan
15	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
16	Dinas Perindustrian
17	Sekretariat Daerah (Biro Umum)
18	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
19	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
20	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
21	Badan Penghubung Daerah

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB, 2023



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Perbandingan realisasi PAD Provinsi NTB tahun 2022 dengan tahun 2023 digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 1.15

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTB Tahun 2021 dan 2023

No.	Uraian	Realisasi		Peningkatan / (Penurunan)	
		Tahun 2022	Tahun 2023	Nilai	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	1.706.131.394.926,00	1.880.836.787.108,00	174.705.392.182,00	10,24
2	Pendapatan Retribusi Daerah	14.455.210.916,00	12.470.517.934,38	-1.984.692.981,62	-13,73
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	50.616.995.897,00	68.185.855.182,00	17.568.859.285,00	34,71
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	520.862.251.135,77	828.538.490.329,46	307.676.239.193,69	59,07
Total		2.292.065.852.874,77	2.790.031.650.553,84	497.965.797.679,07	21,73

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB, 2023

Secara keseluruhan realisasi PAD tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp. 497.965.797.679,07 atau 21,73 % dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 2.292.065.852.874,77. Hampir seluruh komponen PAD tahun 2023 mengalami peningkatan yaitu Pendapatan Pajak Daerah sebesar 10,24 %, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 34,71 % dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 59,07 %, sedangkan Pendapatan Retribusi Daerah mengalami penurunan sebesar -13,73 %. Rincian realisasi masing-masing komponen PAD dijelaskan sebagai berikut:

1) Pajak Daerah

Realisasi Pajak Daerah tahun 2023 sebesar Rp. 1.880.836.787.108,00 atau 94,22 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.996.213.000.000,00, mengalami peningkatan sebesar Rp. 174.705.392.182,00 atau 10,24 % dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 1.706.131.394.926,00;

2) Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah tahun 2023 sebesar Rp. 12.470.517.934,38 atau 50,06 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 24.909.327.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp. 1.984.692.981,62 atau -13,73 % dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 14.455.210.916,00;

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2023 sebesar Rp. 68.185.855.182,00 atau 98,55 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 69.185.855.181,00, mengalami peningkatan sebesar Rp.17.568.859.285,00 atau 34,71 % dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp.50.616.995.897,00;

4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tahun 2023 sebesar Rp.828.538.490.329,46 atau 84,64 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 978.903.306.211,00, mengalami peningkatan sebesar Rp.307.676.239.193,69 atau 59,07 % dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 520.862.251.135,77.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari dua komponen yaitu Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan transfer pemerintah pusat merupakan pendapatan yang diperoleh dari Dana Perimbangan yakni pendapatan pemerintah daerah yang dialokasikan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menunjang program pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) yang merupakan reward dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria sesuai peraturan perundang-undangan. Komponen Dana Perimbangan terdiri dari: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Insentif Daerah (DID).

Pendapatan transfer antar daerah merupakan transfer dari kabupaten dan kota berdasarkan kesepakatan tertentu. Pendapatan transfer antar daerah di Provinsi NTB merupakan transfer dari Kabupaten dan Kota sebagai Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) dan Kompensasi Dampak Negatif (KDN) pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah. Target, realisasi dan komposisi komponen Pendapatan Transfer tahun 2023 tercatat pada perangkat daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di gambarkan pada tabel berikut:

Tabel 1.16

Target, Realisasi dan Kontribusi Komponen Pendapatan Transfer
Provinsi NTB Tahun 2023

No.	Uraian	Target	Realisasi		Kontribusi Terhadap Total Realisasi Pendapatan Daerah (%)
			Rp.	%	
1	Dana Bagi Hasil	580.858.574.689,00	457.937.054.154,00	78,84	15,22
2	Dana Alokasi Umum	1.600.492.624.000,00	1.623.630.483.000,00	101,45	53,98
3	Dana Alokasi Khusus-Fisik	341.137.435.000,00	306.852.319.835,00	89,95	10,20
4	Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	617.106.738.782,00	616.397.782.111,00	99,89	20,49
5	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Bantuan Keuangan	3.329.731.375,00	3.114.070.550,00	93,52	0,10
Total		3.142.925.103.846,00	3.007.931.709.650,00	95,70	100,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB, 2023



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2023 adalah sebesar Rp. 3.007.931.709.650,00 dimana realisasi ini mendekati target yang telah ditetapkan yaitu Rp. 3.142.925.103.846,00 atau sekitar 95,70 %.

Perbandingan realisasi Pendapatan Transfer tahun 2022 dan 2023 dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 1.17
Realisasi Pendapatan Transfer Provinsi NTB Tahun 2022 dan 2023

No.	Uraian	Realisasi		Peningkatan / (Penurunan)	
		Tahun 2022	Tahun 2023	Nilai	%
1	Dana Bagi Hasil	454.633.783.742,00	457.937.054.154,00	3.303.270.412,00	0,73
2	Dana Alokasi Umum	1.475.280.205.081,00	1.623.630.483.000,00	148.350.277.919,00	10,06
3	Dana Alokasi Khusus-Fisik	442.204.312.842,00	306.852.319.835,00	-135.351.993.007,00	-30,61
4	Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	565.332.072.385,00	616.397.782.111,00	51.065.709.726,00	9,03
5	Dana Insentif Daerah (DID)	39.164.046.000,00	0,00	-39.164.046.000,00	-100,00
6	Bantuan Keuangan	1.865.903.125,00	3.114.070.550,00	1.248.167.425,00	66,89
Total		2.978.480.323.175,00	3.007.931.709.650,00	29.451.386.475,00	0,99

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB, 2023

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp. 29.451.386.475,00 atau 0,99 % dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 2.978.480.323.175,00

Penjelasan rincian Pendapatan Transfer tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Dana Bagi Hasil
Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2023 sebesar Rp. 457.937.054.154,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 3.303.270.412,00 atau 0,73 % dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 454.633.783.742,00;
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU)
Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2023 sebesar Rp. 1.623.630.483.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 148.350.277.919,00 atau 10,06 % dari tahun 2022 sebesar Rp. 1.475.280.205.081,00;
- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2023 sebesar Rp. 306.852.319.835,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 135.351.993.007,00 atau -30,61 % dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 442.204.312.842,00;
- 4) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tahun 2023 sebesar Rp. 616.397.782.111,00 mengalami penurunan sebesar



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Rp. 51.065.709.726,00 atau 9,03 % dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 565.332.072.385,00;

5) Dana Insentif Daerah (DID)

Tidak ada target dan realisasi Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2023.

6) Bantuan Keuangan

Realisasi Bantuan Keuangan tahun 2023 sebesar Rp. 3.114.070.550,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.248.167.425,00 atau 66,89 % dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 1.865.903.125,00.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi Lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2023 sebesar Rp. 10.233.268,00 atau 100 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 10.233.268,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp. 32.057.362.668,00 atau 99,97 % dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 32.067.595.936,00.

2) Target dan Realisasi Belanja Daerah

Komponen Belanja Daerah terdiri dari: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Realisasi belanja daerah tahun 2023 sebesar Rp. 5.686.300.429.147,25 atau 90,81 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 6.261.613.644.550,00. Target, realisasi dan kontribusi masing-masing komponen belanja daerah tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 1.18

Target, Realisasi dan Kontribusi Komponen Belanja Daerah Provinsi NTB Tahun 2023

No.	Uraian	Target	Realisasi		Kontribusi Terhadap Total Realisasi Belanja Daerah (%)
			Rp.	%	
1	Belanja Operasi	4.618.871.924.029,00	4.206.705.437.873,75	91,08	73,98
2	Belanja Modal	623.762.810.222,00	545.851.730.153,50	87,51	9,60
3	Belanja Tidak Terduga	3.552.889.499,00	2.834.272.253,00	79,77	0,05
4	Belanja Transfer	1.015.426.020.800,00	930.908.988.867,00	91,68	16,37
Total		6.261.613.644.550,00	5.686.300.429.147,25	90,81	100,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB, 2023

Realisasi belanja tahun 2023 sebesar Rp. 5.686.300.429.147,25 mengalami penurunan sebesar Rp. 187.245.268.290,32 atau -3,19 % dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 5.873.545.697.437,57. Perbandingan realisasi belanja daerah tahun 2022 dan 2023 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 1.19



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Realisasi Belanja Daerah Provinsi NTB Tahun 2022 dan 2023

No.	Uraian	Realisasi		Peningkatan / (Penurunan)	
		Tahun 2022	Tahun 2023	Nilai	%
1	Belanja Operasi	3.701.095.254.837,57	4.206.705.437.873,75	505.610.183.036,18	13,66
2	Belanja Modal	1.313.667.766.855,00	545.851.730.153,50	-767.816.036.701,50	-58,45
3	Belanja Tidak Terduga	466.511.668,00	2.834.272.253,00	2.367.760.585,00	507,55
4	Belanja Transfer	858.316.164.077,00	930.908.988.867,00	72.592.824.790,00	8,46
Total		5.873.545.697.437,57	5.686.300.429.147,25	-187.245.268.290,32	-3,19

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB, 2023

Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi tahun 2023 sebesar Rp. 4.206.705.437.873,75 atau 91,08 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 4.618.871.924.029,00. Rincian target, realisasi dan kontribusi masing-masing komponen Belanja Operasi tahun 2023 digambarkan pada tabel berikut:



Tabel 1.20
Target, Realisasi dan Kontribusi Komponen Belanja Operasi Provinsi NTB
Tahun 2023

No.	Uraian	Target	Realisasi		Kontribusi Terhadap Total Realisasi Belanja Operasi (%)
			Rp.	%	
1	Belanja Pegawai	1.975.732.725.913,00	1.807.361.962.660,00	91,48	42,96
2	Belanja Barang dan Jasa	2.349.693.645.718,00	2.118.748.493.976,75	90,17	50,37
3	Belanja Bunga	51.940.012.298,00	47.402.498.604,00	91,26	1,13
4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Hibah	230.921.914.600,00	223.473.807.133,00	96,77	5,31
6	Belanja Bantuan Sosial	10.583.625.500,00	9.718.675.500,00	91,83	0,23
Total		4.618.871.924.029,00	4.206.705.437.873,75	91,08	100,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB, 2023

Rincian realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Komponen belanja pegawai terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, serta Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.

Realisasi belanja pegawai tahun 2023 sebesar Rp. 1.807.361.962.660,00 atau 91,48 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.975.732.725.913,00. Realisasi belanja pegawai ini mengalami peningkatan sebesar Rp. 162.754.654.337,82 atau 9,90 % dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai tahun 2022 sebesar Rp. 1.644.607.308.322,18. Peningkatan realisasi belanja pegawai ini disebabkan karena : adanya mutasi pegawai antar pemerintah daerah, adanya perubahan struktur organisasi, fluktuasi hari kerja yang cukup berpengaruh terhadap besaran biaya tambahan penghasilan PNS dan juga disebabkan peningkatan pajak daerah atau kurang optimalnya pencapaian retribusi daerah yang berpengaruh terhadap besarnya insentif pemungutan pajak daerah ataupun insentif pemungutan retribusi daerah yang berhak direalisasikan, serta tingginya realisasi pendapatan BLUD yang berpengaruh terhadap besaran jasa pelayanan kesehatan.

b. Belanja Barang dan Jasa.

Komponen Belanja Barang dan Jasa antara lain : belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja uang dan/atau jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, belanja barang dan jasa BOS dan belanja barang dan jasa BLUD.

Realisasi belanja barang dan jasa tahun 2023 sebesar Rp.2.118.748.493.976,75 atau 90,17 % dari target yang ditetapkan sebesar



Rp.2.349.693.645.718,00. Realisasi belanja barang dan jasa tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp.369.295.670.280,36 atau 21,11 % dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 1.749.452.823.696,39.

c. Belanja Bunga.

Belanja bunga ini terdiri dari komponen Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- BUMN-Jangka Panjang, Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek dan Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang.

Realisasi belanja bunga tahun 2023 adalah sebesar Rp. 47.402.498.604,00 atau 91,26 % dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 51.940.012.298,00.

d. Belanja Subsidi.

Pada tahun 2023 tidak terdapat target dan realisasi untuk Belanja Subsidi.

e. Belanja Hibah.

Komponen belanja hibah terdiri dari Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat, Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Realisasi belanja hibah tahun 2023 sebesar Rp. 223.473.807.133,00 atau 96,77 % dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 230.921.914.600,00.

f. Belanja Bantuan Sosial

Komponen belanja bantuan sosial terdiri dari Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat, dan Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

Realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2023 sebesar Rp. 9.718.675.500,00 atau 91,83 % dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 10.583.625.500,00.

Pencapaian realisasi bantuan sosial yang kurang dari 95 % disebabkan oleh dokumen pencairan yang diajukan oleh pemohon masih belum lengkap dan kondisi fiskal pemerintah daerah yang terbatas pada tahun 2023.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

425

426

427

428

Pendapatan				
Kode Rekening	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)

5. INOVASI DAERAH

Berisi ringkasan inventarisasi berbagai inovasi daerah yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang telah dilakukan dan masih berjalan pada tahun pelaporan berdasarkan Database Inovasi Daerah. Dapat pula memasukkan Indeks Inovasi Daerah (apabila ada)

Contoh format penulisan dapat dilihat di bawah ini (tidak ada batasan kata/karakter)

Contoh :

Berdasarkan Database Inovasi Daerah ... Provinsi/Kabupaten/Kota ... memiliki inovasi daerah sebagai berikut :

No	Pelaksana Inovasi Daerah (Diisi dengan nama pelaksana inovasi daerah)	Inovasi Daerah (Judul inovasi daerah)	Keterangan (Deskripsi Inovasi Daerah)

Pedoman Umum Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 | 417

